



Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan  
PENERIMAAN KUNJUNGAN  
BENCHMARKING TIM TPP PEMERINTAH  
PROVINSI BENGKULU  
Yogyakarta, 24 Januari 2019

---

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua!

- Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, beserta rombongan,
- Bapak/Ibu, Tamu Undangan; serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang membahagiakan dan *Insyallah* penuh berkah ini, kami mengajak Bapak/Ibu dan hadirin sekalian untuk memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat *Allah SWT*, karena sampai dengan hari ini kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mengucapkan *selamat datang* kepada Saudara sekalian Tim TPP Pemerintah Provinsi Bengkulu di kota Yogyakarta. Kota yang tumbuh menjadi salah satu pusat pendidikan, budaya, pariwisata terkemuka di Indonesia, kota *cyber* sekaligus kota unik yang memiliki dua wajah. Di satu sisi

adalah simbol tua yang berbalutkan nilai-nilai tradisi leluhur kerajaan Jawa, di satu sisi lainnya merupakan wajah gemerlap modernitas.

Hadirin yang kami hormati,

Sebagai pengantar pertemuan pada hari ini, perkenankanlah kami untuk sedikit menjelaskan terkait dengan Pelaksanaan Perhitungan Nilai Tambah Penghasilan Pegawai di Pemda DIY yang sudah dimulai sejak 2012 lalu.

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta bertujuan untuk meningkatkan kinerja, dan kesejahteraan pegawai.

Pada Pergub tersebut antara lain disebutkan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan berdasarkan bobot pegawai, disiplin dan penilaian prestasi kerja pegawai melalui penilaian kinerja instansi, kinerja Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan kinerja Subbid/Subbag/Seksi.

Kinerja Instansi, Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan kinerja Subbid/Subbag/Seksi adalah unjuk kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dimana penilaiannya dilaksanakan *per triwulan* dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan.

Bobot pegawai adalah penetapan proporsi pegawai berdasarkan tingkat eselon, untuk jabatan struktural dan golongan ruang untuk jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu, sebagai bagian dari total pegawai pemerintah provinsi, dengan mempertimbangkan unsur-unsur klasifikasi jabatan

kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, resiko, dan tanggungjawab.

Bobot instansi adalah proporsi jumlah dan komposisi eselon dan atau golongan ruang pegawai di instansi terhadap bobot pegawai seluruh instansi Pemerintah Provinsi. Sedangkan Nilai Tetap Tambahan Penghasilan adalah nilai dasar sebagai konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk bobot pegawai 1 (terendah).

Oleh karena itu Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja instansi, Bidang/Bagian/Sekretariat/Unit Pelaksana Teknis dan Subbid/Subbag/Seksi *per triwulan* berdasarkan pada bobot pegawai, disiplin pegawai, dan prestasi kerja pegawai, dengan bobot penilaian ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tahun 2012 bobot penilaian disiplin pegawai 50% dan prestasi kerja 50%;
- b. Tahun 2013 bobot penilaian disiplin pegawai 40% dan prestasi kerja 60%;
- c. Tahun 2014 hingga saat ini dan seterusnya bobot penilaian disiplin pegawai 25% dan prestasi kerja 75%

Hadirin yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tentunya banyak hal menarik yang akan menambah wawasan kita semua dalam memahami keunikan pemerintahan di DIY. Oleh karena itu saat ini telah hadir bersama kita utusan dari instansi terkait yang akan menjelaskan lebih lanjut dan lebih jelas.

Kami yakin ada banyak hal menarik yang tentunya akan menambah wawasan kita semua dalam memahami hal ihwal terkait Penghitungan Nilai TPP di DIY. Semoga semua hal yang

menjadi pertanyaan di sesi tanya-jawab nanti, dapat memperoleh jawaban yang lengkap dan memuaskan.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan  
RAPAT KOORDINASI  
FORUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
Yogyakarta, 31 Januari 2019

---

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

- Hadirin, serta Tamu Undangan yang saya hormati,
- Para peserta Rapat Koordinasi yang berbahagia.

Puji dan syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti Rapat Koordinasi Forum Organisasi Perangkat Daerah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya, atas nama Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya menyambut baik serta memberikan apresiasi positif pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Organisasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini penting dilaksanakan, selain sebagai sarana untuk menginformasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan pada Dinas dimaksud

kepada Organisasi Perangkat Daerah, sekaligus sebagai sarana untuk memberikan masukan-masukan positif yang diperlukan, agar dapat mewadahi semua unsur program kegiatan yang diperlukan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan manfaat positif bagi kita semua.

Saudara-saudara sekalian,

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka mewujudkan kelompok perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian, pada tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah meluncurkan program unggulan three ends. Program ini didasarkan pada masih tingginya kekerasan pada perempuan, masih adanya praktek perdagangan manusia, juga kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan dan anak.

Program three ends dimaksud adalah; 1. Akhiri kekerasan perempuan dan anak, 2. Akhiri perdagangan manusia, dan 3. Akhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Program unggulan Kementerian PPPA ini tentu juga menjadi rujukan bagi daerah untuk melakukan upaya yang sejalan dengan kebijakan pusat dengan tetap mengacu pada data dan kebijakan daerah. Meskipun tidak termasuk dalam 5 (lima) besar kasus kekerasan secara nasional, kekerasan pada perempuan dan anak di DIY juga menampilkan wajah yang tidak jauh berbeda dengan nasional. Sebagaimana telah diketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat.

Di DIY, kekerasan pada perempuan dan anak banyak terjadi di wilayah perkotaan, urban dan suburban. Jumlah korban kekerasan terbanyak di setiap kabupaten/kota adalah Bantul Kota di Kabupaten Bantul, Kecamatan Temon dan Wates di Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Paliyan dan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Depok di Kabupaten Sleman dan Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo dan Mantrijeron di Kota

Yogyakarta. Kekerasan ini juga berkorelasi juga dengan kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan, harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan serta kehidupan masyarakat untuk lebih maju dan mandiri.

Untuk itu dalam rangka sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah menetapkan program dan kegiatan meliputi: perencanaan pendudukan, penyediaan parameter kependudukan, analisis dampak kependudukan, kerjasama pendidikan kependudukan, dan penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Saya berharap kepada semua pemangku kepentingan termasuk kabupaten/kota dapat saling bersinergis dan berkoordinasi dalam rangka pengendalian penduduk, meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sehingga melalui strategi yang telah diciptakan akan menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan sosial.

Sekali lagi Saya memberikan apresiasi kepada segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY atas penyelenggaraan kegiatan ini dan kepada peserta selamat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian beberapa hal yang dapat Saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa meridhoi langkah dan upaya kita bersama.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI